

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-12
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-14
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	II-16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	II-33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	II-40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	II-55
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	III-59
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-62
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-68
BAB V : PENUTUP	V- 94

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025.....	I-8
Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-17
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-35
Tabel 2.3	: Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-41
Tabel 2.4	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal	II-44
Tabel 2.5	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT.....	II-45
Tabel 2.6	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-48
Tabel 2.7	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-56
Tabel 3.1	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	III-62
Tabel 3.2	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial.....	III-63
Tabel 3.3	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-65
Tabel 4 1	: Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	IV-68
Tabel 4.2	: Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	IV-69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Renja PD (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada RKPD Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan;

Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/314/BUP-LK/XI/2023 tentang Pembentukan struktur organisasi tim penyusun Renja PD tahun 2025 dan perubahan Renja PD tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam formasi jabatan *ex-officio*. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusun Renja PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Renja PD berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 050/56/5/1/Bapeitbang-LK/2024 tentang penyusunan rancangan awal Renja PD dan Pra RKA tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 serta Renja PD dan kementerian terkait masing- masing, sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah dilaksanakan dimulai sejak bulan Desember 2023. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2025, direncanakan selesai minggu keempat bulan Desember 2023. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

c. Forum Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah diadakan tanggal 3 Mei 2024 di Aula Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Dalam Forum perangkat

daerah Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan Hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan Hasil Musrenbang RKPD 2025 di Kecamatan.

d. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun 2024 untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala perangkat daerah kepada Kepala Bappelitbangda.

e. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

f. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2025 di sampaikan ke Kepala Bappelitbangda paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkada RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh tim. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Kepala Bappelitbangda untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

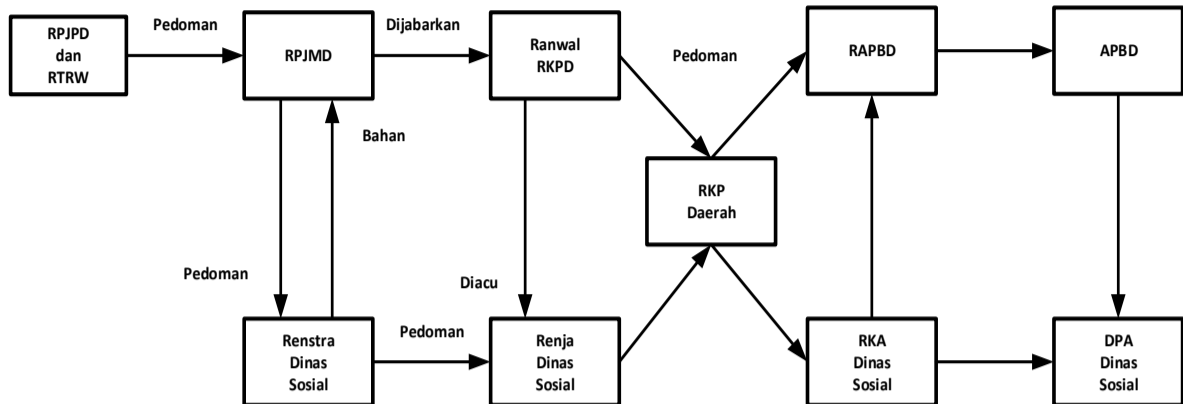
Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja

Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bappelitbangda, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Sumatera Barat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 mengacu pada penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dinas Sosial berperan dalam mendukung **Misi ke 1** Bupati Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan keimanan**, dan **Misi ke 4** Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya**.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

- **Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja)**

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Perangkat Daerah (PD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) selain menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

- **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian sosial RI diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai Pilar Pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (Lima) Tahun kedepan yaitu : **“Kementerian Sosial yang Andal, Profesional dan Inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

- **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Propinsi Sumatera Barat**

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Renja PD, yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota

- **Tidak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD**

UU No.25 tahun 2004 memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Penganggaran yang tercermin pada RAPBN/RAPBD tersebut adalah hasil akhir dari dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), Rencana Kerja Pemerintah Nasional/Daerah (RKPN/RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini berarti bahwa perencanaan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan dilihat dari kerangka waktu terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) berdimensi 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang dalam hal ini rencana kerja pemerintah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanaan ada yang bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan ada pula perencanaan yang dilakukan oleh sub organisasi pemerintah daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sehingga Setelah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 20i9 Nomor T447);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
27. Keputusan Bupati No 050/314/Bup-LK/XI/23 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2025 dan Perubahan rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex-Officio

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2025.

Berkaitan dengan maksud di atas Renja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2025.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Tahun 2025.
- V. Penutup berisikan ketentuan penutup.
Lampiran Keputusan Bupati Nomor 050/314/BUP-LK/XI/2023 tentang pembentukan Stuktur Organisasi Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota														
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	Urusan Sosial													
06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	12 Dokumen	2	2	2	100%	1	5	42%
06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJiP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72 Dokumen	12	12	12	100%	15	39	54%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516 OH	61	63	63	100%	12	136	26%
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72 Dokumen	12	12	-	0%	12	24	33%
06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	50%
06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Bulan	12	12	-	0%	12	24	33%
06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBMMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
06	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%
06	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	0%	95%	95%	95%
06	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelegkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420 Stel	70	-	-	0%	0	70	17%
06	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 OH	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.06	01		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listik yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	12	-	-	0%	12	24	33%
06	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72 Bulan	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06	04		Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar	72 Bulan	12	-	-	0%	12	24	33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan	5.598 Porsi	12	12	12	100%	1093	1,117	20%
06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.532 Porsi dan 870	115	34	34	100%	614	763	14%
06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0	-	-	0%	0	-	0%
06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2	1	0	0	0%	0	-	0%
06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran	2	3	0	0%	0	-	0%
06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin lainnya	Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas	2	-	-	0%	0	-	0%
06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1	-	-	0%	0	-	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	0	-	-	0%	12	12	17%
06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72 Bulan	12	7	1	14%	0	13	18%
06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	1	-	-	0%	0	1	17%
06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72 Bulan	12	12	12	100%	21	45	63%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
06	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72 Bulan	12	12	12	100%	24	48	67%
06	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6 Paket	1	0	0	0%	0	1	17%
06	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	0	0	0	0%	0	-	0%
06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81 Orang PSM	81	81	-	0%	81	81	100%
06	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13 Orang TKSK	13	13	-	0%	13	13	100%
06	02	2.03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos), Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE	150 RLTH, 6 kali Sosialisasi, 300 KPM dan 30 Klpk	135	147	-	0%	200	200	41%
06	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS	92	2	-	0%	2	92	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	6 Sosialisasi, 60 Orang Bantuan	11	-	-	0%	-	11	17%
06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban	6 orang	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	11972 Orang Permakanan Lansia dan 180 Orang UEP Lansia	2,195	979	-	0%	1,320	3,515	29%
06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596 Orang	0	60	-	0%	7,070	7,070	1186%
06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528 Orang	90	75	0	0%	75	165	31%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	360 Kasus ABH/ Anak Terlantar	0	50	50	100%	60	110	31%
06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman UILS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	273 Orang, 1 Rumah Singgah	45	67	57	85%	70	172	63%
06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150 Orang	0	128	146	0%	30	176	37%
06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480 Orang	0	1043	1009	97%	1395	2,404	501%
06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06.04.2.01.11	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169 Orang	16	15	15	100%	16	47	28%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	
06	04	2.02	02		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	60 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	03		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	04		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	05		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	06		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60 Orang	0	-	-	0%	-	0%	0%
06	04	2.02	07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140 orang	20	30	72	240%	5	97	69%
06	04	2.02	08		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60 Orang	0	-	-	0%	183	183	305%
06	04	2.02	10		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	0	19,476	15,355	79%	212,391	212,391	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
06	04	2.02	11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	12		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	13		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	14		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti 150 orang	27	0	0	0%	0	-	0%
06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
06	05	2.01			Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06	05	2.01	01		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	108 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	02		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	03		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	05	2.02	01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13 Kecamatan	13	13	0	0%	13	13	100%
06	05	2.02	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	22451	13	0	0%	24,418	24,994	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti 150 orang	27	0	0	0%	0	-	0%
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	108 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13 Kecamatan	13	13	0	0%	13	13	100%
06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	22451	13	0	0%	24,418	24,994	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	05	2.02	03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16.898 KPM	0	13	0	0%	18,226	16,898	100%
06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	25 KTK 25 WRS, 264 UEP KTK dan WRSE	0	33	0	0%	50	50	14%
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	858 Paket 1 Gudang Logistik	1	164	164	100%	173	338	39%
06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900 Paket	0	0	0	0%	173	173	19%
06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	-	-	-	0%	0	0	0%
06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlantar dalam perjalanan	72 orang	6	9	9	100%	9	24	33%
06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi	82	31	20	65%	82	82	99%

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2023 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH,

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub Kegiatan yang direncanakan target di renja sebanyak 7 sub kegiatan yang terealisasi sebanyak 2 sub kegiatan ini di karenakan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mencukupi. Untuk 3 Sub kegiatan tersebut target terealisasi semuanya 100 %.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub kegiatan yang ditargetkan dalam renja sebanyak 5 Sub Kegiatan terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan dan yang 2 sub kegiatan ini dari target yang di tetapkan terealisasi semuanya 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target 95 % terealisasi 95 % dengan sub kegiatan yang direncanakan dalam renja sebanyak 6 sub kegiatan terealisasi sebanyak 5 sub kegiatan. 1 Sub Kegiatan lagi tidak terakomodir karena kemampuan keuangan daerah tidak memadai. Dari 5 sub kegiatan yang terealisasi dari target yang di tetapkan semuanya terealisasi sesuai target 100%.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 95 % terealisasi 95 %.yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial,dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegiatan ini memiliki 8 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2023 tapi

yang terealisasi sebanyak 4 sub kegiatan karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari 4 Sub kegiatan yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).

- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2023 yang terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan. Dari 3 Sub kegiatan yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target target 95 % terealisasi 95 %. Sub kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan keluaran Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana alam dan sosial dan Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan keluaran kegiatan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (Mayat Terlantar) dan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (orang Terlantar dalam Perjalanan), dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan keluaran kegiatan Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dari target yang direncanakan terealisasi 100%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan target 95% terealisasi sebanyak 95 %. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota keluaran kegiatan, Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1 kali peringatan. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Bulan Kerja Tenaga Kontrak (Tenaga Keamanan Makam Pahlawan) yang Dibayarkan sebanyak 12 bulan. Target terealisasi 100%.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2023 program dan kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dalam renja terdapat target dari 2 sub kegiatan ini karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi jadi sub kegiatan ini tidak terealisasi.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak jadi terealisasi karena tidak cukupnya kemampuan keuangan daerah untuk pemenuhan kegiatan ini.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan ini Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi sebanyak 81 orang, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan ini.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako 25.287 KPM, kegiatan monitoring ini tidak dapat terlaksana karena kemampuan keuangan daerah terbatas.

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapan siagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana tidak dapat terealisasi karena ketidak mampuan keuangan daerah.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2023 program dan kegiatan yang melebihi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan tidak ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh PD dan terkait dengan Tupoksi PD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			25	25	25	25	25		25	25	
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			20	25	30	30	20		30	30	
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			275	300	263	263	275		263	263	
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	√			0	5	5	5	0		5	5	
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	√			173	180	162	162	173		162	162	
6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√		86.8	88.2	89.6	91,3	86.8		89.6	91,3	
7	Persentase PMKS yang tertangani		√		94.5	95.2	96.2	97,1	94.5		96.2	97,1	
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		√		93.6	93.8	94	94,3	93.6		94	94,3	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√		98	98	98	98	98		98	98	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√		98	98	98	98	98		98	98	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√		64	65	66	67	64		66	67	
12	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√		7.6	7.6	7.6	7,6	7.6		7.6	7,6	
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		√		100	100	100	100	100		100	100	
14	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			√	74	76	78	80	74		78	80	
15	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			√	95	95	95	95	95		95	95	
16	Nilai AKIP			√	65	65	65	65	65		65	65	
17	Nilai IRB			√	16.75	17	17.25	17,50	16.75		17.25	17,50	
18	Nilai IKM			√	85	85	85	85	85		85	85	

Analisa Indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota (tabel 2.2) :

Indikator dari nomor 1 sampai 5 adalah indikator pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator SPM terdiri dari :

1. Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaiannya 25 orang disabilitas dan teralisasi sebanyak 25 orang, jadi pencapaian 100%.
2. Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaiannya 30 orang anak terlantar dan teralisasi sebanyak 30 orang, jadi pencapaian 100%.
3. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaiannya 263 orang lanjut usia dan teralisasi sebanyak 263 orang, jadi pencapaian 100%.
4. Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. Pada indikator ini targetnya 0 dan realisasinya 0. Karena indikator ini tidak ada data dukungannya.
5. Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Target 126 orang terealisasi sebanyak 126 orang, pencapaian 100 %.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menuangkan capaian SPM ini ke dalam Dokumen perencanaan dan Alokasi Anggaran untuk percepatan pencapaian SPM.

Indikator dari nomor 6 sampai 13 adalah indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator IKD terdiri dari :

6. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
7. Persentase PMKS yang tertangani.
8. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
9. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
10. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
11. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
12. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
13. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota.
14. Indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah melebihi target yang di tetapkan setiap tahunnya.

indikator kinerja daerah (IKD) adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator dari nomor 14 sampai 18 adalah indikator Kinerja Utama Kepala PD yaitu Dinas Sosial yang mempunyai 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

15. Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan target 72 % terealisasi 74 % realisasi melebihi target yang direncanakan. Analisa terhadap Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seberapa banyak pelayanan kepada PPKS pada tahun n bagi jumlah PPKS pada tahun n. Data naik turun ini berpengaruh

kepada anggaran tiap tahun yang dikelola oleh Dinas Sosial. Semakin banyak anggaran semakin banyak PPKS yang terlayani.

16. Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan target 95 % dan realisasi 95 %. Target terealisasi 100%. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial . Target untuk peran aktif PSKS dalam Penyelenggaraan PSKS adalah tetap karena disini di nilai seberapa banyak PSKS yang berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial apada tahun n di bagi dengan jumlah keseluruhan PSKS yang ada pada tahun n.
17. Nilai AKIP, target 65 % terealisasi 65 % pencapaian target 100%.
18. Nilai IRB, target 16, 5 terealisasi 16,75 %. Realisasi melebihi target yang direncanakan.
19. Nilai IKM, dengan target 85 terealisasi 85 %.

Indikator yang di nilai pada Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yang ke 3 yaitu Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM Dinas Sosial . Pada pencapaian target ini berdasarkan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun yang di nilai.

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Provinsi , Kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA

18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi :

“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ” Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai- nilai keagamaan, dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Sasaran :

- a. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Misi ke-4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya, dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran :

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 2.4
SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

PELUANG (Opportunities)		ANCAMAN (Threats)	
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
O2	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T2	Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS		

Tabel 2.5

**Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi ➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai 	<p>KELEMAHAN (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang ➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi ➤ Keterbatasan anggaran ➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang ➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan
<p>PELUANG (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi ➤ Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional ➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS 	<p><u>STRATEGI S + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial ➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi ➤ Meningkatkan kesejahteraan PPKS 	<p><u>STRATEGI W + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>). ➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS
<p>ANCAMAN (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan 	<p><u>STRATEGI S + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana 	<p><u>STRATEGI W + T</u></p> <p>Meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>

1. Strategi Kekuatan – Peluang (S – O) :

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan PPKS

2. Strategi Kelemahan – Peluang (W – O) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (networking).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS

3. Strategi Kekuatan – Ancaman (S – T) :

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W – T) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PPKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PPKS

4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai-nilai kesetiakawanan sosial
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sebesar Rp. 16.334.407.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan berdasarkan pagu indikatif PD untuk RKPD tahun 2025 adalah Rp7.078.401.437,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) rancangan awal dan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel 2.6. berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		6,261,936,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		3,907,793,013.00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		88,600,000.00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		16,970,350.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	1 Dokumen	18,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah RKA	1 Dokumen	11,400,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah RKA Perubahan	1 Dokumen	10,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah DPA	1 Dokumen	10,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah DPA Perubahan	1 Dokumen	10,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen LKIP ,SPIP,LKPJ,EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi dan SPM	10 Dokumen	19,700,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	9,970,350.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan monitoring Kegiatan APBD	61 OH	8,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD		4,857,980,700.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD		3,651,213,153.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat Pengadaan)	12 bulan	4,800,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,646,213,153.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Penatausahaan dan SPJ kegiatan untuk verivikasi	12 dokumen	42,780,700.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	00 dokumen		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	6,300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12 bulan	4,400,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	4,500,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,500,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2,029,650	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah RKBMD dan RKPMD	2 Dokumen	3,900,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Dokumen	3,900,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	2,029,650	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma		44,996,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah stel pakian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	70 Stel	35,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	70 Paket		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah OH yang mengikuti Bimbingan Teknis Implimentasi Peraturan Perundang-Undangan	15 OH	9,996,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				337,109,300.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				90,710,760.00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah alat listrik yang diadakan	12 bulan	15,500,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,499,000.00	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 bulan	42,500,000.00	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 Paket	11,370,860.00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	41,809,300.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,000,000.00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	8,500,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	dokumen	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	545 Porsi	28,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9,970,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	727 porsi 115 OH	200,800,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	59,870,900.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				158,450,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35,000,000.00	
	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	2 set lemari arsip, 1 set kursi tamu dan 20 buah kursi rapat	40,000,000.00	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Set kursi tunggu pasien (bangku), 1 set kursi tamu (sofa) 20 Buah kursi rapat / (40 Unit)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	118,450,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	35,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,594,100.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,094,100.00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	60,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus Barang Pengguna	12 bulan dan 320 Hari	270,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				427,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,275,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah bulan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	260,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit kendaraan roda 6, 5 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan Roda 2/(21 unit)	80,275,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 Bulan	17,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit AC, 15 Unit komputer/note book/ 6 unit printer (24 Unit)	6,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	1 Paket	150,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan		2,421,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan		429,923,200.00	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		2,421,000,000.00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		429,923,200.00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	81 orang PSM	450,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM	81 orang PSM	250,238,400.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	13 orang TKSK	175,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan TKSK Berprestasi Tingkat Kabupaten	13 orang TKSK	79,684,800.00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sarana dan prasarana PMKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH, Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos) dan Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin	14 RTLH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit dan 50 KPM	550,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi UEP-FM dan RTLH, Jumlah Bantuan Sosial RTLH, UEP-FM, UEP-KUBE dan pertemuan kelompok KUBE	4 kali sosialisasi, 150 Paket UEP-FM, 40 Unit RTLH dan 1 Kelompok KUBE	-	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Bantuan untuk KUBE-FM Penumbuhan dan Pengembangan Jumlah Karang Taruna yang mengikuti sosialisasi dan lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang diberdayakan	28 KUBE- FM, 4 kali Sosialisasi dan 81 Karang Taruna, 11 LKS, dan 1 LKKS	1,071,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi tentang peran dan fungsi LKKS dan sosialisasi peningkatan SDM pengurus Karang Taruna	2 kali Sosialisasi	100,000,000.00	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan penyerahan bantuan untuk masyarakat	1 Sosialisasi LKKS dan 10 Orang Bantuan Barang	175,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi tentang peran dan fungsi LK3 serta pencegahan, jumlah penganggulan kekerasan terhadap anak dibawah umum dan jumlah bantuan sosial barang	2 kali sosialisasi dan 30 paket		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial		4,254,000,000.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial		1,854,539,800.00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		3,824,000,000.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		735,580,000.00	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial dan UEP Bagi Lansia	2610 orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	2,400,000,000.00	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemberian bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial, anak terlantar, penyandang disabilitas dan gelandangan dan pengemis	100 Lansia terlantar dan lansia tidak potensial, 60 orang Anak Terlantar, 100 orang Disabilitas dan 10 orang pengemis	83,000,000.00	
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Bayi terlantar	30 Orang	210,000,000.00	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Bayi terlantar	12 orang	28,480,000.00	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	55 Orang	280,000,000.00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	18 orang	29,090,000.00	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikik Keluarga	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	84,000,000.00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikik Keluarga dan penyuluhan sosial kepada keluarga ABH	50 Kasus ABH/Anak Terlantar	27,826,000.00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelatihan, Pelayanan, bantuan UEP dan Alat Bantu cacat bagi penyandang Disabilitas, tersedianya Rumah Idaman UILS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	87 Orang, 1 Rumah Singgah	300,000,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang disabilitas	0 orang	-	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	25 orang	150,000,000.00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah peserta bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0 orang	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, Pelatihan bagi anak terlantar/putus sekolah dan pengiriman anak ke panti rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut terhadap anak terlantar (putus Sekolah)	83 Orang dan 30 orang	200,000,000.00	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar,dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi anak terlantar dan putus sekolah pasca pelatihan	615 Orang	537,750,000.00	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	32 Orang	200,000,000.00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kab	25 orang	29,434,000.00	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		430,000,000.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		1,118,959,800.00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan Bimbingan Lanjut terhadap wanita tuna susila	15 orang dan 10 orang	250,000,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bantuan UEP bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial eks. Narapidana dan wanita tuna susila	86 orang	393,959,900.00	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	692,994,900.00	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD serta sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	180,000,000.00	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD serta sosialisasi	15 Orang	32,005,000.00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial		1,610,000,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial		370,575,200.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		1,610,000,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten		370,575,200.00	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	425,000,000.00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	39,998,400.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring penyakuran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	24.994 KPM	160,000,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring penyakuran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	24.418 KPM	-	
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	16.898 orang KPM	375,000,000.00	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	18.226 KPM	330,576,800.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP	25 KTK, 25 WRSE dan 50 Bantuan UEP	650,000,000.00	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP	KTK dan WRSE		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani		428,000,000.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani		495,570,224.00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten		228,000,000.00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten		495,570,224.00	
	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	150 Paket, dan 1 unit	100,000,000.00	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	190 Paket	215,321,724.00	
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana	150 Paket	100,000,000.00	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana	112 Paket	188,148,600.00	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 16 orang terlantar dalam perjalanan	15,000,000.00	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 7 orang terlantar dalam perjalanan	16,420,000.00	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan Selter Pengungsi	82 orang dan 1 Unit	13,000,000.00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana	20 orang	75,679,900.00	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		200,000,000.00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		-	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan kampung siaga bencana	1 kali sosialisasi	100,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan kampung siaga bencana	1 kali sosialisasi		-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Perekrutan Tagana Muda	25 orang	100,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25 orang		-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan		120,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan		20,000,000.00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		120,000,000.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		20,000,000.00	
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Rehap dan 1 Kali Peringatan	120,000,000.00	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah peringatan hari pahlawan 10 November dan lomba puisi pejuang	1 kali peringatan	20,000,000.00	
			Total		15,094,936,000.00			Total		7,078,401,437.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum PD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2024, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 disajikan pada tabel II.7 berikut :

Tabel 2.7					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025					
Kabupaten Lima Puluh Kota					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
MUSRENBANG					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia)	70 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
a	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin)	12 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

POKOK PIKIRAN DPRD					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Alat Bantu Disabilitas dan UEP Disabilitas)	3 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia dan UEP Lansia,)	395 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2	Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu usaha Ekonomi produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	10 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE)	18 Orang dan 2 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yaitu :

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 untuk Dinas Sosial pada arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi pembangunan SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari :

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan dan Pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu :

a. Pernyataan Visi

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat ”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain. PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.

- Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

b. Pernyataan Misi di susun sebagai berikut :

1. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

c. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :
 - Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - Meningkatnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - Meningkatkan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - Tersalurnya bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran
 - Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya.
2. Sasaran
 - Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - Peningkatan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- Meningkatkan penyaluran bantuan bagi KK atau Masyarakat yang tertimpa bencana
- Meningkatnya jumlah seseorang yang memiliki semangat kepedulian.

Sasaran Program Urusan Sosial

- *Kemiskinan*, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- *Keterlantaran*, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (4) lansia terlantar
- *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda
- *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) eks warga binaan, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
- *Akibat Bencana*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- *Korban Tindak Kekerasan* meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Pekerja Sosial Profesional
- (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- (3) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- (4) Keluarga Pioner

- (5) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
- (6) Penyuluh Sosial
- (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- (8) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- (9) Karang Taruna
- (10) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- (12) Dunia Usaha

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Sosial. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

A.	PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
2.	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 1 Program 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.

Tabel 3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

A.	PROGRAM	:	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	Kegiatan	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
B.	PROGRAM	:	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial

	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar 6. Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. 7. Pemberian Layanan Rujukan
3.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. 3. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
C.	PROGRAM	:	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.	Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
D.	PROGRAM	:	PENANGANAN BENCANA
5.	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4. Pelayanan Dukungan Psikososial
E.	PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
6	Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Sosial 5 Program 6 Kegiatan 20 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2023 Dinas Sosial melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, IKD, SDG'S, PUG dan SPM Dinas Sosial.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Bencana. Program pendukung PUG adalah Program Rehabilitasi Sosial.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
					(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	06	01		Program : Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	3,908,602,537	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		95%	4,092,563,000
1	06	01	2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	16,970,100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	21,500,000
1	06	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	3,651,222,937	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	3,510,000,000
1	06	01	2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	1,980,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	5,000,000
1	06	01	2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	91,763,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	109,563,000
1	06	01	2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	34,100,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	20,500,000
1	06	01	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	25,556,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	61,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	87,010,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	364,500,000
1	06 02	Program : Pemberdayaan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	478,919,600	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	95%	900,000,000
1	06 02 2.03	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	478,919,600	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	95%	900,000,000
1	06 04	Program : Rehabilitasi Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,754,912,300	INSENTIF FISKAL,, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	IKU OPD, SPM, PUG	100%	5,715,000,000
1	06 04 2.01	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	735,580,000	INSENTIF FISKAL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	IKU OPD, SPM, PUG	100%	2,965,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06 04 2.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,019,332,300	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, INSENTIF FISKAL	IKU OPD, PUG	100%	2,750,000,000
1	06 05	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	85%	407,028,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	85%	780,576,800
1	06 05 2.02	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	407,028,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	95%	780,576,800
1	06 06	Program : Penanganan Bencana	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	495,570,400	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKU OPD, SPM	100%	567,311,000
1	06 06 2.01	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	495,570,400	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKU OPD, SPM	100%	567,311,000
1	06 07	Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	33,368,000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUNSEBELUMNYA	Peringatan Hari Panlawan 10 November	95%	25,000,000
1	06 07 2.01	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	33,368,000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUNSEBELUMNYA	Peringatan Hari Panlawan 10 November	95%	25,000,000
		Jumlah			7,078,401,437				12,080,450,800

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra PD tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 dikelompokkan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan 6 Program, ... Kegiatan dan ... Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 4.1, Tabel 4.2. Uraian Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan, Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2025 Tabel 4.1 dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabl 4.2.

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	Bidang Urusan	Tahun 2025		Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)	Tahun 2025		Tahun 2026 Total Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	3.907.793.013	4.112.063.000	7	3.907.793.013	4.112.063.000	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	3	3.170.608.424	7.757.311.000	10	3.170.608.424	7.757.311.000	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS SOSIAL						7.078.401.437,00							12.099.950.800,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.078.401.437,00							12.099.950.800,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.078.401.437,00							12.099.950.800,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 %	3.988.602.537,00						-	4.112.063.000,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-			95 %	10.970.100,00					Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem emntahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	21.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.970.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem emntahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkat an kualitas tata kelola penyelengg araan pem emntahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.651.222.837,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.510.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	3.846.222.837,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI/ CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.660.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0002		Penggajian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPO TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakisan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.763.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	109.563.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diodedakan				12 Paket	12.358.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diodedakan				12 Paket	8.078.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.060.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008		Facilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	59.885.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	20.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	34.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.556.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	61.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	1.056.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah						87.010.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		384.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Handaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	80.210.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	8.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	8.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi					1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	-				95 %	478.919.600,00					-	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-			95 %	479.019.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	259.372.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Orang	92.947.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat 1)Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.09.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat 1)Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Peningkatan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.09.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kalentagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kevenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA SADI HASIL SDA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN SADI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kevenangan Kabupaten/Kota				30 Sertifikat	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesejahteraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	-			100 %	1.754.912.300,00						-	5.715.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-			100 %	735.580.000,00			Memperkuat 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Panwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	2.965.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Pemukiman															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	83.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Panwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGKAT DAERAH
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerna Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	28.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat 1)Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan bertajaja sang Pantesato dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003		Penyetiaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat 1)Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan bertajaja sang Pantesato dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant Sosial		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004		Pemberian Pelayanan Reurfikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BALAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Runkaci Keluarga Kawenangan Kabupaten Kota				50 Orang	27.828.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	DIPA LEMAH PERBENTUNGAN ANGGARAN TAHUN 2024 SEBELUMNYA, INSENTIF FISKAL	Memperkuat /Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, huan, terampil dan berdaya saing	Disabilitas/Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009		Pemberian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual dan Sosial Kawenangan Kabupaten Kota				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KaiDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGOLNAMAAN PA BIDANG KESEHATAN, INSENTIF FISKAL	Memperkuat /Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, huan, terampil dan berdaya saing Penderita dan Peningkatan Status Sosial Masyarakat	Disabilitas/Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesebaratan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Disabilitas/Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				465 Orang	537.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesebaratan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Disabilitas/Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rajukan Kevenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	20.434.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Disabilitas/Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				100 %	1.019.332.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		2.750.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	FRAKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGANAAN						KELOMPOK SASARAN	FRAKSI MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual dan Sosial Kawasanngan KabupatenKota				80 Orang	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGOLNANAN YA BIDANG PENDIDIKAN, ROSENTIF FISKAL,	Memperluas Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partisipasi Sosial		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kawasanngan KabupatenKota				112 Orang	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGOLNANAN YA BIDANG PENDIDIKAN, ROSENTIF FISKAL,	Memperluas Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partisipasi Sosial		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0010		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PELAKSANAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PELAKSANAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kecamatan Kabupaten Kota				15 Orang	32.004.000,00	Kali, Lima Puluh Kota, Demas Kecamatan, Demas Kali Demas	DAU YANG DITENTUKAN P (PENDANAAN) YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat dan Pembang- unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing	Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Suban Kurban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Part Sosial		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1.06.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Peserta Perlindungan dan Jaminan Sosial	-			85 %	407.028.600,00						-	786.570.800,00	
	1.06.03.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	-			85 %	407.028.600,00			Memperkuat dan Pembang- unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, terampil dan berdaya saing	Petani Sumber Daya Manusia Sosial (PMS)	-	786.570.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.02.0001	Pembinaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didala				257716 Orang	76.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAKI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengalasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				24418 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing. Peningkatan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				22950 Keluarga	330.570.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Peserta dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS)		330.570.800,00	DINAS SOSIAL
	1.00.05.2.02.0004	fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing Peserta dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS)		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	-			100 %	495.570.400,00						-	567.211.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-			100 %	495.570.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta- huan, terampil dan berdaya saing Parwisata dan Pening- katan Ekonomi Masyarakat	Korban Bencana	-	502.311.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemasakan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungutan) Kevenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	229.769.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta- huan, terampil dan berdaya saing Parwisata dan Pening- katan Ekonomi Masyarakat	Korban Bencana		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Keengkapannya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pungutan) dan Pasca Bencana Kevenangan Kabupaten/Kota				101 Orang	188.148.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta- huan, terampil dan berdaya saing	Korban Bencana		217.311.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Peranganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan / Rawan Kabupaten/Kota				9 Orang	16.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Korban Bencana		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	61.233.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Korban Bencana		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02		Penyelenggaraan Pembentayan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						0,00				Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanjara Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tugas Sebagai Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	-			95 %	33.368.000,00						-	25.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-			96 %	33.368.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemertahanan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Peringatan Hari Pahlawan	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.368.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemertahanan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Peringatan Hari Pahlawan		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
JUMLAH								7.678.401.437,00							12.898.950.800,00	

BAB V

P E N U T U P

Renja Dinas Sosial ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial 2021-2026.

Renja Dinas Sosial memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Dinas Sosial sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pjs. BUPATI LIMA PULUH KOTA

AHMAD ZAKRI, S.SOS. M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-12
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-14
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-15
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU	II-16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	II-16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	II-33 II-40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	II-55
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-58
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial.....	III-59
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-62
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	IV-68
BAB V : PENUTUP	V- 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Kalender Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025	I-8
Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-17
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	II-35
Tabel 2.3	: Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-41
Tabel 2.4	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal	II-44
Tabel 2.5	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT	II-45
Tabel 2.6	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-48
Tabel 2.7	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-56
Tabel 3.1	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	III-62
Tabel 3.2	: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial	III-63
Tabel 3.3	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	III-65
Tabel 4 1	: Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	IV-68
Tabel 4.2	: Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	IV-69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Renja PD (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada RKPD Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan;

Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/314/BUP-LK/XI/2023 tentang Pembentukan struktur organisasi tim penyusun Renja PD tahun 2025 dan perubahan Renja PD tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam formasi jabatan *ex-officio*. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusun Renja PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan Renja PD berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 050/56/5/1/Bapeitbang-LK/2024 tentang penyusunan rancangan awal Renja PD dan Pra RKA tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi dan Nasional dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 serta Renja PD dan kementerian terkait masing- masing, sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah dilaksanakan dimulai sejak bulan Desember 2023. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2025, direncanakan selesai minggu keempat bulan Desember 2023. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

c. Forum Perangkat Daerah

Forum perangkat daerah diadakan tanggal 3 Mei 2024 di Aula Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Dalam Forum perangkat daerah

Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan Hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan Hasil Musrenbang RKPD 2025 di Kecamatan.

d. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam acara forum perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan saran hasil Forum Konsultasi publik RKPD dan usulan musrenbang RKPD di Kecamatan. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun 2024 untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala perangkat daerah kepada Kepala Bappelitbangda.

e. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

f. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2025 di sampaikan ke Kepala Bappelitbangda paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkada RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh tim. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Kepala Bappelitbangda untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

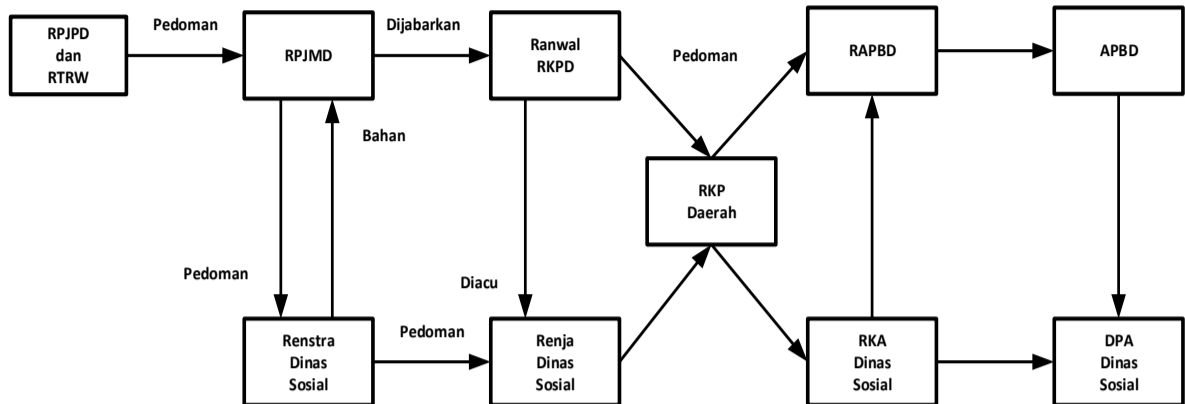
Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD,

merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bappelitbangda, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Sumatera Barat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 mengacu pada penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dinas Sosial berperan dalam mendukung **Misi ke 1** Bupati Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan keimanan**, dan **Misi ke 4** Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya**.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

- **Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja)**

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Perangkat Daerah (PD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) selain menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat juga menjadi

pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

- **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh kementerian sosial RI diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai Pilar Pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan Fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (Lima) Tahun kedepan yaitu : **“Kementerian Sosial yang Andal, Profesional dan Inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

- **Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Propinsi Sumatera Barat**

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan

Subkegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota

- **Tidak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD**

UU No.25 tahun 2004 memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Penganggaran yang tercermin pada RAPBN/RAPBD tersebut adalah hasil akhir dari dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), Rencana Kerja Pemerintah Nasional/Daerah (RKPN/RKPD), Rencana Srategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini berarti bahwa perencanaan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan dilihat dari kerangka waktu terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) berdimensi 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang dalam hal ini rencana kerja pemerintah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanaan ada yang bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan ada pula perencanaan yang dilakukan oleh sub organisasi pemerintah daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sehingga Setelah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2023				2024																											
		Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		I	I	III	V	I	I	II	V	I	I	III	V	I	I	II	IV	I	I	II	V	I	I	I	IV	I	I	I	IV	I	I	I	IV
4	Penyempurnaan Ranwal Renja berdasarkan hasil forum Dinas Sosial dan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																																
C.	Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial																																
1	Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial																																
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD																																
3	Verifikasi Renja oleh Bappelitbangda untuk menjamin bahwa rancangan renja Dinas Sosial sudah selaras dengan rancangan awal RKPD																																
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani																																

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor T447);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 123);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
27. Keputusan Bupati No 050/314/Bup-LK/XI/23 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2025 dan Perubahan rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex-Officio

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2025.

Berkaitan dengan maksud di atas Renja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2025.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan Rencana kerja dan pendaan Dinas Sosial Tahun 2025.
- V. Penutup berisikan ketentuan penutup.
Lampiran Keputusan Bupati Nomor 050/314/BUP-LK/XI/2023 tentang pembentukan Stuktur Organisasi Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1														
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023														
Kabupaten Lima Puluh Kota														
SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota														
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
Urusan Sosial														
06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	12 Dokumen	2	2	2	100%	1	5	42%
06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJiP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72 Dokumen	12	12	12	100%	15	39	54%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516 OH	61	63	63	100%	12	136	26%
06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72 Dokumen	12	12	-	0%	12	24	33%
06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	1	1	1	100%	1	3	50%
06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Bulan	12	12	-	0%	12	24	33%
06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1	1	-	0%	1	2	33%
06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBMMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12 Dokumen	2	2	-	0%	2	4	33%
06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	0%	95%	95%	95%
06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelegkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420 Stel	70	-	-	0%	0	70	17%
06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	54 OH	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listik yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	12	-	-	0%	12	24	33%
06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72 Bulan	0	-	-	0%	0	-	0%
06	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar	72 Bulan	12	-	-	0%	12	24	33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan	5.598 Porsi	12	12	12	100%	1093	1,117	20%
06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.532 Porsi dan 870	115	34	34	100%	614	763	14%
06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persetase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	0	-	-	0%	0	-	0%
06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 6 Unit Kendaraan Roda 2	1	0	0	0%	0	-	0%
06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Lemari Arsip, Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja, Rak Buku/Koran	2	3	0	0%	0	-	0%
06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin Lainnya	Laptop, Notebook, Komputer, Printer, UPS, AC, CCTV, FingerPrint, TV, Kulkas	2	-	-	0%	0	-	0%
06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1	-	-	0%	0	-	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	-	-	0%	0	-	0%
06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72 Bulan	12	12	12	100%	12	36	50%
06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	0	-	-	0%	12	12	17%
06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72 Bulan	12	7	1	14%	0	13	18%
06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	1	-	-	0%	0	1	17%
06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72 Bulan	12	12	12	100%	21	45	63%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
06	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72 Bulan	12	12	12	100%	24	48	67%
06	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6 Paket	1	0	0	0%	0	1	17%
06	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	0	0	0	0%	0	-	0%
06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81 Orang PSM	81	81	-	0%	81	81	100%
06	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13 Orang TKSK	13	13	-	0%	13	13	100%
06	02	2.03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos), Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE	150 RLTH, 6 kali Sosialisasi, 300 KPM dan 30 Klpk	135	147	-	0%	200	200	41%
06	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	80 Karang Taruna, 11 LKS, 1 LKKS, Sosialisasi dan Musda LKKS	92	2	-	0%	2	92	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	6 Sosialisasi, 60 Orang Bantuan	11	-	-	0%	-	11	17%
06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban	25%	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban	6 orang	0	-	-	0%	0%	0%	0%
06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	85%
06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	11972 Orang Permakanan Lansia dan 180 Orang UEP Lansia	2,195	979	-	0%	1,320	3,515	29%
06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596 Orang	0	60	-	0%	7,070	7,070	1186%
06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528 Orang	90	75	0	0%	75	165	31%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	360 Kasus ABH/ Anak Terlantar	0	50	50	100%	60	110	31%
06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman UILS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	273 Orang, 1 Rumah Singgah	45	67	57	85%	70	172	63%
06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150 Orang	0	128	146	0%	30	176	37%
06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480 Orang	0	1043	1009	97%	1395	2,404	501%
06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	11	Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30 Orang	0	0	0	0%	0	-	0%
06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169 Orang	16	15	15	100%	16	47	28%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti 150 orang	27	0	0	0%	0	-	0%
06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	108 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156 orang	0			0%	0	0%	0%
06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13 Kecamatan	13	13	0	0%	13	13	100%
06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	22451	13	0	0%	24,418	24,994	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60 Orang	0	-	-	0%	-	-	0%
06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	9 Panti 150 orang	27	0	0	0%	0	-	0%
06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
06.05.2.01	Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	108 orang	0			0%	0	0%	0%
06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130 orang	0			0%	0	0%	0%
06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156 orang	0			0%	0	0%	0%
06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%
06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13 Kecamatan	13	13	0	0%	13	13	100%
06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24.994 KPM	22451	13	0	0%	24,418	24,994	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
06	05	2.02	03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16.898 KPM	0	13	0	0%	18,226	16,898	100%
06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	25 KTK 25 WRS, 264 UEP KTK dan WRSE	0	33	0	0%	50	50	14%
06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%	95%
06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	858 Paket 1 Gudang Logistik	1	164	164	100%	173	338	39%
06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900 Paket	0	0	0	0%	173	173	19%
06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 Unit	-	-	-	0%	0	0	0%
06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlantar dalam perjalanan	72 orang	6	9	9	100%	9	24	33%
06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	82 Orang Tagana dan 1 selter Pengungsi	82	31	20	65%	82	82	99%

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2023 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH,

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub Kegiatan yang direncanakan target di renja sebanyak 7 sub kegiatan yang terealisasi sebanyak 2 sub kegiatan ini di karenakan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mencukupi. Untuk 3 Sub kegiatan tersebut target terealisasi semuanya 100 %.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan direncanakan target 95 % terealisasi 95 %. Sedangkan Sub kegiatan yang ditargetkan dalam renja sebanyak 5 Sub Kegiatan terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan dan yang 2 sub kegiatan ini dari target yang di tetapkan terealisasi semuanya 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan target 95 % terealisasi 95 % dengan sub kegiatan yang direncanakan dalam renja sebanyak 6 sub kegiatan terealisasi sebanyak 5 sub kegiatan. 1 Sub Kegiatan lagi tidak terakomodir karena kemampuan keuangan daerah tidak memadai. Dari 5 sub kegiatan yang terealisasi dari target yang di tetapkan semuanya terealisasi sesuai target 100%.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 95 % terealisasi 95 %.yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial,dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegiatan ini memiliki 8 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2023 tapi yang

teralisasi sebanyak 4 sub kegiatan karena sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari 4 Sub kegiatan yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).

- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan target kegiatan 85 % terealisasi sebanyak 85 %. Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2023 yang terealisasi sebanyak 3 sub kegiatan. Dari 3 Sub kegiatan yang terealisasi semuanya memenuhi target pencapaian (100%).

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan target target 95 % terealisasi 95 %. Sub kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan keluaran Jumlah Penyediaan Makanan untuk korban bencana alam dan sosial dan Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan keluaran kegiatan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (Mayat Terlantar) dan Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (orang Terlantar dalam Perjalanan), dan sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan keluaran kegiatan Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dari target yang direncanakan terealisasi 100%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan target 95% terealisasi sebanyak 95 %. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota keluaran kegiatan, Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1 kali peringatan. Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Bulan Kerja Tenaga Kontrak (Tenaga Keamanan Makam Pahlawan) yang Dibayarkan sebanyak 12 bulan. Target terealisasi 100%.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 program dan kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD dalam renja terdapat target dari 2 sub kegiatan ini karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi jadi sub kegiatan ini tidak terealisasi.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak jadi terealisasi karena tidak cukupnya kemampuan keuangan daerah untuk pemenuhan kegiatan ini.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota keluaran kegiatan ini Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi sebanyak 81 orang, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk kegiatan ini.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota keluaran kegiatan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako 25.287 KPM, kegiatan monitoring ini tidak dapat terlaksana karena kemampuan keuangan daerah terbatas.

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat Rawan Bencana tidak dapat terealisasi karena ketidak mampuan keuangan daerah.

Realisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2023 program dan kegiatan yang melebihi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan tidak ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh PD dan terkait dengan Tupoksi PD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar , Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.

3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			25	25	25	25	25		25	25	
2	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			20	25	30	30	20		30	30	
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	√			275	300	263	263	275		263	263	
4	Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	√			0	5	5	5	0		5	5	
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	√			173	180	162	162	173		162	162	
6	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√		86.8	88.2	89.6	91,3	86.8		89.6	91,3	
7	Persentase PMKS yang tertangani		√		94.5	95.2	96.2	97,1	94.5		96.2	97,1	
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		√		93.6	93.8	94	94,3	93.6		94	94,3	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKD	IKU KPL OPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√		98	98	98	98	98		98	98	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√		98	98	98	98	98		98	98	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√		64	65	66	67	64		66	67	
12	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√		7.6	7.6	7.6	7,6	7.6		7.6	7,6	
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota		√		100	100	100	100	100		100	100	
14	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			√	74	76	78	80	74		78	80	
15	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			√	95	95	95	95	95		95	95	
16	Nilai AKIP			√	65	65	65	65	65		65	65	
17	Nilai IRB			√	16.75	17	17.25	17,50	16.75		17.25	17,50	
18	Nilai IKM			√	85	85	85	85	85		85	85	

Analisa Indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota (tabel 2.2) :

Indikator dari nomor 1 sampai 5 adalah indikator pencapaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator SPM terdiri dari :

1. Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaiannya 25 orang disabilitas dan teralisasi sebanyak 25 orang, jadi pencapaian 100%.
2. Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaiannya 30 orang anak terlantar dan teralisasi sebanyak 30 orang, jadi pencapaian 100%.
3. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Target pencapaiannya 263 orang lanjut usia dan teralisasi sebanyak 263 orang, jadi pencapaian 100%.
4. Jumlah warga Negara /Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. Pada indikator ini targetnya 0 dan realisasinya 0. Karena indikator ini tidak ada data dukungannya.
5. Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Target 126 orang terealisasi sebanyak 126 orang, pencapaian 100 %.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3), serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menuangkan capaian SPM ini ke dalam Dokumen perencanaan dan Alokasi Anggaran untuk percepatan pencapaian SPM.

Indikator dari nomor 6 sampai 13 adalah indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota indikator IKD terdiri dari :

6. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
7. Persentase PMKS yang tertangani.

8. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
9. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
10. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.
11. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.
12. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
13. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota.
14. Indikator pencapaian Indikator Kinerja Daerah melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

indikator kinerja daerah (IKD) adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator dari nomor 14 sampai 18 adalah indikator Kinerja Utama Kepala PD yaitu Dinas Sosial yang mempunyai 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

15. Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan target 72 % terealisasi 74 % realisasi melebihi target yang direncanakan. Analisa terhadap Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seberapa banyak pelayanan kepada PPKS pada tahun n bagi jumlah PPKS pada tahun n. Data naik turun ini berpengaruh kepada anggaran tiap tahun yang dikelola oleh Dinas Sosial. Semakin banyak anggaran semakin banyak PPKS yang terlayani.

16. Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan target 95 % dan realisasi 95 %. Target terealisasi 100%. PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial . Target untuk peran aktif PSKS dalam Penyelenggaraan PSKS adalah tetap karena disini di nilai seberapa banyak PSKS yang berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial apada tahun n di bagi dengan jumlah keseluruhan PSKS yang ada pada tahun n.
17. Nilai AKIP, target 65 % terealisasi 65 % pencapaian target 100%.
18. Nilai IRB, target 16, 5 terealisasi 16,75 %. Realisasi melebihi target yang direncanakan.
19. Nilai IKM, dengan target 85 terealisasi 85 %.

Indikator yang di nilai pada Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial yang ke 3 yaitu Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM Dinas Sosial . Pada pencapaian target ini berdasarkan nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun yang di nilai.

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota khusus Provinsi , Kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membatu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Visi Kementerian Sosial adalah : “Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : ‘ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “. Dalam penerapan Renstra kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan , mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan . Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang

baik (Good Governance), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau disebut juga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA

18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi :

“ Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ” Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai- nilai keagamaan, dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Sasaran :

- a. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Misi ke-4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya, dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan Sasaran :

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintang performance efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 2.4

SWOT Analisa Internal dan Eksternal

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

	PELUANG (Opportunities)		ANCAMAN (Threats)
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
O2	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T2	Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS		

Tabel 2.5

Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi ➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai 	<p>KELEMAHAN (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang ➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi ➤ Keterbatasan anggaran ➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang ➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan
<p>PELUANG (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi ➤ Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional ➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PPKS 	<p><u>STRATEGIS + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial ➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi ➤ Meningkatkan kesejahteraan PPKS 	<p><u>STRATEGI W + O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial ➤ Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>). ➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS
<p>ANCAMAN (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan 	<p><u>STRATEGIS + T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunkan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana 	<p><u>STRATEGI W + T</u></p> <p>Meningkatkan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>

1. Strategi Kekuatan - Peluang (S - O) :

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan PPKS

2. Strategi Kelemahan - Peluang (W - O) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (networking).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PPKS

3. Strategi Kekuatan - Ancaman (S - T) :

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

4. Strategi Kelemahan-Ancaman (W - T) :

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PPKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran PSKS dalam penanganan PPKS

4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sebesar Rp. 16.334.407.000,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan setelah di analisa hasil kebutuhan berdasarkan pagu indikatif PD untuk RKPD tahun 2025 adalah Rp7.078.401.437,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Satu Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) rancangan awal dan analisa kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel 2.6. berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA											
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		6,261,936,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah		3,907,793,013.00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		88,600,000.00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		16,970,350.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	1 Dokumen	18,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah RKA	1 Dokumen	11,400,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah RKA Perubahan	1 Dokumen	10,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah DPA	1 Dokumen	10,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah DPA Perubahan	1 Dokumen	10,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen LKJIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, Penetapan Kinerja, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi dan SPM	10 Dokumen	19,700,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	9,970,350.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan monitoring Kegiatan APBD	61 OH	8,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD		4,857,980,700.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD		3,651,213,153.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan (Honor, PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, PPHP, Pejabat Pengadaan)	12 bulan	4,800,000,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,646,213,153.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah Penatausahaan dan SPJ kegiatan untuk verivikasi	12 dokumen	42,780,700.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	00 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	6,300,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12 bulan	4,400,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	4,500,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinsos	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,500,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7,800,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2,029,650	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah RKBMD dan RKPMD	2 Dokumen	3,900,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dinsos	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	3 Dokumen	3,900,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinsos	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	2,029,650	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma		44,996,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah stel pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	70 Stel	35,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	70 Paket		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah OH yang mengikuti Bimbingan Teknis Implimentaasi Peraturan Perundang-Undangan	15 OH	9,996,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				337,109,300.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah				90,710,760.00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah alat listrik yang diadakan	12 bulan	15,500,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1,499,000.00	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 bulan	42,500,000.00	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	12 Paket	11,370,860.00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	41,809,300.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,000,000.00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	8,500,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	dokumen	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah porsi makan minum tamu yang disediakan	545 Porsi	28,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinsos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9,970,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah porsi makan minum rapat dan jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	727 porsi 115 OH	200,800,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	59,870,900.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				158,450,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35,000,000.00	
	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	2 set lemari arsip, 1 set kursi tamu dan 20 buah kursi rapat	40,000,000.00	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Set kursi tunggu pasien (bangku), 1 set kursi tamu (sofa) 20 Buah kursi rapat / (40 Unit)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor dan Mesin Lainnya	2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	118,450,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit Laptop, 1 unit Komputer, 3 unit Printer, 2 unit UPS, 1 unit AC dan 1 unit CCTV	35,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,594,100.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,094,100.00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	60,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus Barang Pengguna	12 bulan dan 320 Hari	270,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				427,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,275,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah bulan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	260,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit kendaraan roda 6, 5 unit kendaraan roda 4, 14 unit kendaraan Roda 2/(21 unit)	80,275,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	12 Bulan	17,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinsos	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit AC, 15 Unit komputer/note book/ 6 unit printer (24 Unit)	6,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	1 Paket	150,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan		2,421,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang diberdayakan		429,923,200.00	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		2,421,000,000.00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		429,923,200.00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	81 orang PSM	450,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM	81 orang PSM	250,238,400.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan pilar-pilar berprestasi	13 orang TKSK	175,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan pemilihan TKSK Berprestasi Tingkat Kabupaten	13 orang TKSK	79,684,800.00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sarana dan prasarana PMKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH, Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos) dan Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin	14 RTLH, 1 kali Sosialisasi, 1 Unit dan 50 KPM	550,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi UEP-FM dan RTLH, Jumlah Bantuan Sosial RTLH, UEP-FM, UEP-KUBE dan pertemuan kelompok KUBE	4 kali sosialisasi, 150 Paket UEP-FM, 40 Unit RTLH dan 1 Kelompok KUBE	-	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Bantuan untuk KUBE-FM Penumbuhan dan Pengembangan Jumlah Karang Taruna yang mengikuti sosialisasi dan lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang diberdanakan	28 KUBE- FM, 4 kali Sosialisasi dan 81 Karang Taruna, 11 LKS, dan 1 LKKS	1,071,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi tentang peran dan fungsi LKKS dan sosialisasi peningkatan SDM pengurus Karang Taruna	2 kali Sosialisasi	100,000,000.00	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan LK3 dan penyerahan bantuan untuk masyarakat	1 Sosialisasi LKKS dan 30 Orang Bantuan Barang	175,000,000.00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi tentang peran dan fungsi LK3 serta pencegahan, jumlah penganggulan kekerasan terhadap anak dibawah umum dan jumlah bantuan sosial barang	2 kali sosialisasi dan 30 paket		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial		4,254,000,000.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial		1,854,539,800.00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		3,824,000,000.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial		735,580,000.00	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Permakanan Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial dan UEP Bagi Lansia	2610 orang Permakanan Lansia dan 30 orang UEP Lansia	2,400,000,000.00	Penyediaan Permakanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pemberian bantuan permakanan bagi lansia terlantar dan lansia tidak potensial, anak terlantar, penyandang disabilitas dan gelandangan dan pengemis	100 Lansia terlantar dan lansia tidak potensial, 60 orang Anak Terlantar, 100 orang Disabilitas dan 10 orang pengemis	83,000,000.00	
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Bayi terlantar	30 Orang	210,000,000.00	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Bayi terlantar	12 orang	28,480,000.00	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	55 Orang	280,000,000.00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	18 orang	29,090,000.00	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga	60 Kasus ABH/Anak Terlantar	84,000,000.00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikas Keluarga dan penyuluhan sosial kepada keluarga ABH	50 Kasus ABH/Anak Terlantar	27,826,000.00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pelatihan, Pelayanan, bantuan UEP dan Alat Bantu cacat bagi penyandang Disabilitas, tersedianya Rumah Idaman UILS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	87 Orang, 1 Rumah Singgah	300,000,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang disabilitas	0 orang	-	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	25 orang	150,000,000.00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah peserta bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0 orang	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, Pelatihan bagi anak terlantar/putus sekolah dan pengiriman anak ke panti rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut terhadap anak terlantar (putus Sekolah)	83 Orang dan 30 orang	200,000,000.00	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar, dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi anak terlantar dan putus sekolah pasca pelatihan	615 Orang	537,750,000.00	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	32 Orang	200,000,000.00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kab	25 orang	29,434,000.00	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		430,000,000.00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial		1,118,959,800.00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan Bimbingan Lanjut terhadap wanita tuna susila	15 orang dan 10 orang	250,000,000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah bantuan UEP bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial eks. Narapidana dan wanita tuna susila	86 orang	393,959,900.00	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	692,994,900.00	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD serta sosialisasi	Jamkesda 18.500 Jiwa, PBI JKN 176.017 Jiwa, PBI JKSS 17.874 Jiwa	180,000,000.00	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Lima Puluh Kota	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD serta sosialisasi	15 Orang	32,005,000.00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial		1,610,000,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Jumlah Penerima Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial		370,575,200.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1,610,000,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		370,575,200.00	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	425,000,000.00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	39,998,400.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring penyakuran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	24.994 KPM	160,000,000.00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring penyakuran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako	24.418 KPM	-	
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	16.898 orang KPM	375,000,000.00	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	18.226 KPM	330,576,800.00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP	25 KTK, 25 WRSE dan 50 Bantuan UEP	650,000,000.00	Fasilitasi Bantuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) serta Bantuan UEP	KTK dan WRSE		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani		428,000,000.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Tertangani		495,570,224.00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten		228,000,000.00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten		495,570,224.00	
	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	150 Paket, dan 1 unit	100,000,000.00	Penyediaan Makanan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	190 Paket	215,321,724.00	
	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana	150 Paket	100,000,000.00	Penyediaan Sandang	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penyediaan Sandang bagi Korban Bencana	112 Paket	188,148,600.00	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 16 orang terlantar dalam perjalanan	15,000,000.00	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Mayat terlantar dan orang terlantar dalam perjalanan	2 orang mayat terlantar dan 7 orang terlantar dalam perjalanan	16,420,000.00	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana dan Selter Pengungsi	82 orang dan 1 Unit	13,000,000.00	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana	20 orang	75,679,900.00	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		200,000,000.00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten		-	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan kampung siaga bencana	1 kali sosialisasi	100,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan kampung siaga bencana	1 kali sosialisasi	-	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Perekutan Tagana Muda	25 orang	100,000,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25 orang	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan		120,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Terkelolanya Makam Pahlawan		20,000,000.00	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		120,000,000.00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		20,000,000.00	
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Rehap dan 1 Kali Peringatan	120,000,000.00	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah peringatan hari pahlawan 10 November dan lomba puisi pejuang	1 kali peringatan	20,000,000.00	
			Total		15,094,936,000.00			Total		7,078,401,437.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum PD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2024, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2025 disajikan pada tabel II.7 berikut :

Tabel 2.7					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025					
Kabupaten Lima Puluh Kota					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial					
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
MUSRENBANG					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia)	70 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
Kegiatan :Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
a	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin)	12 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

POKOK PIKIRAN DPRD					
1	Program : REHABILITASI SOSIAL				
1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Alat Bantu Disabilitas dan UEP Disabilitas)	3 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan : Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Permakanan Lansia dan UEP Lansia,)	395 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
a	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (pemberian bantuan sosial yaitu usaha Ekonomi produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK)	10 Orang	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
b	Sub Kegiatan :Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (UEP Fakir Miskin dan UEP KUBE)	18 Orang dan 2 Kelompok	Layak sesuai dengan kemampuan anggaran daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yaitu :

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur

3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 untuk Dinas Sosial pada arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi pembangunan SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari :

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan dan Pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 yaitu :

a. Pernyataan Visi

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat ”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain. PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.
- Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

b. Pernyataan Misi di susun sebagai berikut :

1. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

c. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :
 - Meningkatnya Pelayanan Prima dan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - Meningkatnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - Meningkatkan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - Tersalurnya bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran
 - Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya.
2. Sasaran
 - Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - Peningkatan Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - Meningkatkan penyaluran bantuan bagi KK atau Masyarakat yang tertimpa bencana
 - Meningkatnya jumlah seseorang yang memiliki semangat kepedulian.

Sasaran Program Urusan Sosial

- *Kemiskinan*, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- *Keterlantaran*, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (4) lansia terlantar
- *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda
- *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) eks warga binaan, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
- *Akibat Bencana*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- *Korban Tindak Kekerasan* meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Pekerja Sosial Profesional
- (2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- (3) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- (4) Keluarga Pioner
- (5) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
- (6) Penyuluh Sosial
- (7) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- (8) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- (9) Karang Taruna

- (10) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- (11) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- (12) Dunia Usaha

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Penetapan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2025 mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Sosial. Ringkasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

A.	PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
2.	Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

			3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Fasilitas Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.	Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 1 Program 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan.

Tabel 3.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

A.	PROGRAM	:	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	Kegiatan	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
B.	PROGRAM	:	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar 6. Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. 7. Pemberian Layanan Rujukan
3.	Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial

	Sub Kegiatan	:	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. 3. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
C.	PROGRAM	:	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4.	Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
D.	PROGRAM	:	PENANGANAN BENCANA
5.	Kegiatan	:	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4. Pelayanan Dukungan Psikososial
E.	PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
6	Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	:	1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah Urusan Pemerintah Bidang Sosial 5 Program 6 Kegiatan 20 Sub Kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2023 Dinas Sosial melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, IKD, SDG'S, PUG dan SPM Dinas Sosial.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Bencana. Program pendukung PUG adalah Program Rehabilitasi Sosial.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
												(1)
1	06	01		Program : Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	3,908,602,537	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM		95%	4,092,563,000
1	06	01	2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	16,970,100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	21,500,000
1	06	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	3,651,222,937	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	3,510,000,000
1	06	01	2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	1,980,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	5,000,000
1	06	01	2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	91,763,500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	109,563,000
1	06	01	2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	34,100,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	20,500,000
1	06	01	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	25,556,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	61,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	87,010,000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Kegiatan Rutin bagian Sekretariat	95%	364,500,000
1	06	02		Program : Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang di Berdayakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	478,919,600	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	95%	900,000,000
1	06	02	2.03	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	478,919,600	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	95%	900,000,000
1	06	04		Program : Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,754,912,300	INSentif FISKAL,, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	IKU OPD, SPM, PUG	100%	5,715,000,000
1	06	04	2.01	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	735,580,000	INSentif FISKAL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	IKU OPD, SPM, PUG	100%	2,965,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06 04 2.02	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	1,019,332,300	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, INSENTIF FISKAL	IKU OPD, PUG	100%	2,750,000,000
1	06 05	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kabupaten Lima Puluh Kota	85%	407,028,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	85%	780,576,800
1	06 05 2.02	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	407,028,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	IKU OPD	95%	780,576,800
1	06 06	Program : Penanganan Bencana	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	495,570,400	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKU OPD, SPM	100%	567,311,000
1	06 06 2.01	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	495,570,400	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	IKU OPD, SPM	100%	567,311,000
1	06 07	Program : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	33,368,000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUNSEBELUMNYA	Peringatan Hari Panlawan 10 November	95%	25,000,000
1	06 07 2.01	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	33,368,000	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUNSEBELUMNYA	Peringatan Hari Panlawan 10 November	95%	25,000,000
		Jumlah			7,078,401,437				12,080,450,800

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra PD tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 dikelompokkan dalam 2 urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan 6 Program, ... Kegiatan dan ... Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 4.1, Tabel 4.2. Uraian Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan, Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2025 Tabel 4.1 dan Renjana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabl 4.2.

Tabel 4.1
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	Bidang Urusan	Tahun 2025		Tahun 2026 Pagu Indikatif (Rp.)	Tahun 2025		Tahun 2026 Total Pagu Indikatif (Rp)	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	3.907.793.013	4.112.063.000	7	3.907.793.013	4.112.063.000	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	3	3.170.608.424	7.757.311.000	10	3.170.608.424	7.757.311.000	

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						7.078.401.437,00							12.099.950.800,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.078.401.437,00							12.099.950.800,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.078.401.437,00							12.099.950.800,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 %	3.908.602.537,00						-	4.112.063.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-			95 %	16.970.100,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	21.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.970.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.651.222.937,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.510.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				39 Orang/bulan	3.646.222.937,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.980.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Pengemba ngan Pertanian dan Perikanan menuju Agribisnis	-		18.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				39 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.783.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	109.563.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.359.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.079.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.063.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	59.865.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	20.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	34.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.556.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	61.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	1.056.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		19.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.010.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	384.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	80.210.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	-			95 %	478.919.600,00						-	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-			85 %	478.919.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	-	900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	259.372.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				13 Orang	89.547.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Sertifikat	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	-			100 %	1.754.912.300,00						-	5.715.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	-			100 %	735.580.000,00			Memperkuat Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	2.965.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				90 Orang	83.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakainya dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	28.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	13.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	27.826.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA. INSENTIF FISKAL	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	16.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, INSENTIF FISKAL	Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				465 Orang	637.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	29.434.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-			100 %	1.019.332.300,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	2.750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	393.959.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, INSENTIF FISKAL	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		950.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0008		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				112 Orang	593.368.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, INSENTIF FISKAL	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0010		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	32.004.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		900.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	-			85 %	407.028.600,00						-	780.576.800,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	-			95 %	407.028.600,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	780.576.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				257716 Orang	76.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengenalan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>				24418 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Panwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				22960 Keluarga	330.576.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		330.576.600,00	DINAS SOSIAL
	1.08.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	-			100 %	495.570.400,00						-	567.311.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-			100 %	495.570.400,00			-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Korban Bencana	-	502.311.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	229.788.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Pening katan Ekonomi Masyarakat	Korban Bencana		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				151 Orang	188.148.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing	Korban Bencana		217.311.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	16.420.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Korban Bencana		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	61.233.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Korban Bencana		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	-			95 %	33.368.000,00						-	25.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-			95 %	33.368.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Peringatan Hari Pahlawan	-	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.368.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Peringatan Hari Pahlawan		25.000.000,00	DINAS SOSIAL
J U M L A H								7.078.401.437,00							12.099.950.800,00	

BAB V

P E N U T U P

Renja Dinas Sosial ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial 2021-2026.

Renja Dinas Sosial memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Dinas Sosial sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO